

**GOVERNMENT - BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs)
DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA SEMARANG**

OLEH:

Tri Yuniningsih, Neni Sriwahyuni

(Departemen Administrasi Publik, FISIP-UNDIP),
Prof.Soedarto, SH Street.Tembalang, Semarang.Jawa Tengah

Email: triyuniningsih67@yahoo.com,

Hp: 085865964390

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah memandang sangat pentingnya kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam Semarang dalam mengembangkan pariwisata di kota Semarang. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana peran Pemerintah dan Swasta dan pentingnya kemitraan dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang. Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah kemitraan antara Pemerintah dan Swasta sebagai aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang masih belum optimal. Tipe penelitian termasuk tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Penentuan informan dengan teknik *Snowball*, dengan *key informan* Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran Pemerintah dalam hal ini masih sangat dominan dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang dan peran swasta masih kurang. Hal ini disebabkan dalam pengembangan pariwisata pemerintah masih ingin menunjukkan povernya, sementara untuk berkembang terganjal pada regulasi yang menghambat. Pihak swasta dalam hal ini merasa kurang bisa bekerjasama dengan Pemerintah mengingat Pemerintah selalu justru dibalik semua kegiatan swasta menumpang dan hanya sekedar memfasilitasi. Sedangkan harapan swasta pemerintah bisa menjadi mitra yang nyata disemua aspek kegiatan pengembangan pariwisata. Rekomendasi yang disampaikan adalah peningkatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dengan merangkul semua elemen atau aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata berdasarkan asas sama- sama menguntungkan.

Keywords: *Pemerintah, Pengembangan, Pariwisata, Swasta*

GOVERNMENT - BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs)
IN DEVELOPMENT OF TOURISM IN SEMARANG CITY

BY:

Tri Yuniningsih, Neni Sriwahyuni
(Department of Public Administration, FISIP-UNDIP),
Prof.Soedarto, SH Street. Tembalang, Semarang. Central Java
Email: triyuniningsih67@yahoo.com,
Mobile: 085865964390

Abstract

The background of this research is to see the importance of the partnership between the government and the private sector in Semarang in developing tourism in the city of Semarang. The research objective is to describe the role of the Government and the Private Sector and the importance of partnerships in the development of tourism in the city of Semarang. The problem faced so far is that the partnership between the Government and Private actors involved in developing tourism in the city of Semarang is still not optimal. qualitative approach. Data collection is done by interview and observation. Determination of informants with the Snowball technique, with the key informant of the Semarang City Tourism Office. From the results of the study it can be seen that the Government's role in this case is still very dominant in tourism development in Semarang City and the role of the private sector is lacking. showing its power, while developing it is hampered by inhibiting regulations. The private sector in this case feels that it is unable to cooperate with the Government considering that the Government is always behind all private activities to hitch a ride and only facilitate it. While the hope of the private sector can be a real partner in all aspects of tourism development activities. The recommendations presented were an increase in partnerships between the government and the private sector by embracing all elements or actors involved in tourism development.

Keywords: Government, Development, Tourism, Private

A. PENDAHULUAN

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah dari: (1) Victoria M. Waligo, Jackie Clarke, Rebecca Hawkin(2001), *Implementing Sustainable Tourism: Multi Stakeholder Involvement Management (MSIM) Framework, Tourism Managemant*. (2) Albert N. Kimbu and Michael Z. Ngoasong(2013) *Centralized Decentralization of Tourism Development : A Network Perspective, Annals of Tourism Research*. (3) Carl Crafton & Anne Permalof (2005), Fokus penelitiannya tentang proses kebijakan publik dan *networking*, dimana temuan penelitiannya adalah Peran media massa sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan politik, akan tetapi *content* berita menjadi hal yang penting. (4) Bach&Niklasson (2012), Fokus penelitiannya adalah *Principal dan Agen Theory*, dimana temuan penelitiannya adalah Kebijakan yang didelegasikan kepada agen sebaiknya dilakukan dengan mekanisme akuntabilitas dan transparansi.(5) Tri Yuniningsih (2018), Analisis Jaringan Aktor dalam Pengembangan Pariwisata kota Semarang.

Teori yang dipakai berkaitan dengan kemitraan adalah dari Howlett dan Ramesh, yang dimaksud dengan *policy network* (jejaring kebijakan) adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor pemerintah, masyarakat termasuk privat (Yuniningsih,2018:47). Aktor-aktor kebijakan publik sering disebut sebagai *stakeholders*. Kerjasama antara organisasi publik dengan aktor-aktor atau *stakeholders* menimbulkan organisasi *hybrid* semacam *cluster* dan *quano*. Savas (dalam Suwitri,2011) menyebut hubungan organisasi publik dengan privat sebagai *public-private partnerships*. UN ESCAP (dalam Yuniningsih,2018) meneliti konsep *governance* dan aktor yang terlibat (*government*, militer dan masyarakat sipil) dalam pembuatan keputusan dan implementasinya baik dari struktur formal maupun informal. *Good governance* tercipta

apabila keseluruhan aktor aktif terlibat dalam proses kebijakan sejak pembuatan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan. Howlett dan M. Ramesh (dalam Yuniningsih,2018:56) mengemukakan bahwa aktor kebijakan (*policy aktor*) merupakan *policy subsystem* yang berada dalam jejaring kebijakan antara *organization of the international system*, *organization of the society* dan *organization of the state*. Aktor kebijakan terdiri atas : 1) *elected officials* yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 2) *appointed officials* atau pejabat politik yang ditunjuk oleh pejabat politik terpilih untuk duduk dalam birokrasi, 3) *interest group*, 4) *research organization*, 5) media massa. Aktor-aktor tersebut saling berinteraksi untuk memberikan persetujuan (pro) maupun ketidaksetujuan (kontra) terhadap suatu kebijakan. Interaksi tersebut membentuk koalisi. Seringkali media massa menjadi perangkat pemicu (*trigger device*) dari kuat lemahnya hubungan antar aktor. Pendapat ini dikemukakan Cobb dan Elder (dalam Tri Yuniningsih,2018:56-57). Cobb dan Elder mengemukakan bahwa aktor kebijakan terdiri dari pemerintah dan sekumpulan publik yang mengetahui dan tertarik dengan urusan publik dan yang mempunyai pemimpin opini, dan media massa yang menjadi pemicu bagi kuat lemahnya tekanan publik tersebut terhadap pemerintah agar suatu urusan publik tersebut (isu) menjadi *policy output*. Peran media massa sangat penting dalam membangkitkan perhatian, memprovokasi aksi, melemahkan penentangan, menunjukkan kekuatan komitmen dan dukungan. Dalam setiap proses kebijakan publik terdapat aktor-aktor yang memainkan peran masing-masing dari proses pembuatan kebijakan hingga proses evaluasi kebijakan. Mengacu pendapat Viney (dalam Suwitri,2011), aktor atau *stakeholders* dapat dipilah ke dalam 4 kategori yaitu a) primer: aktor dengan pengaruh yang tinggi dan mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi, untuk merekrut aktor kategori ini dengan cara *partner*; b) sekunder: aktor dengan pengaruh yang tinggi tetapi tingkat kepentingan yang rendah, untuk merekrut aktor kategori ini dengan cara *consult*; c) sekunder kedua atau tersier, yaitu aktor dengan pengaruh yang rendah tetapi memiliki kepentingan yang tinggi, untuk merekrut aktor kategori ini dengan cara *inform*; d) aktor sekunder ketiga atau kwarter, yaitu aktor dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah, untuk merekrut aktor kategori ini dengan cara *control*. Dalam Bukunya Anderson (tahun 1979; Lester dan Stewart, tahun 2000: 2) mengatakan bahwa aktor yang terlibat memiliki peran sendiri – sendiri dalam suatu kebijakan yang meliputi : Legislatif, Eksekutif, Yudikatif,Instansi administratif, kelompok kepentingan dan warga masyarakat.Dari banyak pendapat pakar di atas dapat diketahui bahwa aktor dalam kebijakan adalah

mereka yang terlibat secara langsung pada pelaksanaan suatu kebijakan, karena tanpa adanya aktor kebijakan tidak akan bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Latar belakang penelitian ini adalah memandang sangat pentingnya kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam mengembangkan pariwisata di kota Semarang. Permasalahan yang dihadapi adalah kemitraan antara Pemerintah dan Swasta sebagai aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang masih belum optimal (RPJMD Kota Semarang tahun 2016 -2021). Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana peran dan kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang. Dalam penelitian ini hanya akan mengkaji tentang bagaimana peran dan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Peran Pemerintah

Sebagai tindak lanjut terhadap Undang-Undang Kepariwisata No.10 Tahun 2009, dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepariwisataan serta untuk meningkatkan daya saing Kota Semarang yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, maka Pemerintah Kota Semarang membuat Perda tentang Kepariwisata Nomor 3 Tahun 2010. Perda ini sebagai dasar Regulasi dari Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan tentang Kepariwisata. Berkaitan dengan masalah kemitraan dan kerjasama aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang, dan dengan mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab IX, Bab X dan Bab XI yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perda kota Semarang Nomor 3 tahun 2010 tentang Kepariwisata, Bab X, Bab XI dan Bab XII dapat diketahui bahwa masalah kerjasama dan kemitraan serta koordinasi antar aktor yang terlibat sudah diatur dengan jelas. Namun dalam kenyataannya belum optimal. Permasalahan dalam pengembangan pariwisata, terutama dalam hal kemitraan dan

kerjasama dengan *stakeholder* dapat dilihat dari Evaluasi Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2011 sd 2015 yang dilaksanakan tahun 2016 sbb :

“Pada saat pelaksanaan program/kegiatan pada sasaran pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata di Kota Semarang terdapat kendala yang dihadapi, sebagai berikut: (1) terbatasnya jumlah media bahan dan promosi kepariwisataan Kota Semarang dan (2) kurang koordinasi dengan asosiasi pelaku usaha pariwisata, khususnya biro-biro perjalanan wisata.”

Selain itu dalam kaitannya dengan program pengembangan kemitraan kepariwisataan yang ditarget 25% dengan indikasi kinerja okupansi hotel rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir hanya tercapai 5,7%. (RPJMD, 2016), Perkembangan jumlah pelaku pariwisata juga tidak mengalami peningkatan dimana rata-rata selama 3 (tiga) tahun terakhir tetap di tingkat 10 %.

Dalam tahapan implementasi terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, dan diidentifikasi berasal dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok- kelompok penekan, dan organisasi-organisasi komunitas (James Anderson, 2003). Pada umumnya birokrasi / pemerintah dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan. Pandangan ini berlaku untuk implementasi kebijakan Negara maju maupun Negara yang sedang berkembang (NSB). Birokrasi mempunyai wewenang yang besar untuk sepenuhnya menguasai “area” implementasi kebijakan dalam wilayah operasinya karena mereka mendapat mandate dari lembaga legislatif. Berkaitan dengan peran inilah maka pemerintah kota Semarang dalam penelitian memiliki peran melaksanakan kebijakan tentang kepariwisataan yang langsung dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Dinas dalam hal ini menjadi koordinator semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di kota Semarang.

Tabel 1

Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata kota Semarang

Pemerintah	Peran
------------	-------

Disbudpar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan Evaluasi 2. Keuangan 3. Umum dan kepegawaian 4. Urusan Bidang Kebudayaan, Kesenian, Pembinaan Industri Pariwisata, Pemasaran (Promosi)
Bappeda	Perencanaan Pengembangan Pariwisata yang tersusun dalam Renstra Kota Semarang
Dishubkominfo	Penyediaan akses dan infrastruktur berkaitan dengan kepariwisataan
Diskimtaru	memfasilitasi dalam hal homestay, penginapan
Dinas Pekerjaan Umum	Memfasilitasi sarana dan prasarana jalan
Dinas Pertamanan	Memfasilitasi keberadaan taman kota
Dinas Pertanian	Memfasilitasi bidang pertanian, peternakan,
Dinas Kehutanan	Memfasilitasi bidang kehutanan
Disperindag	Memfasilitasi bidang industri dan perdagangan
Koperasi dan UMKM	Memfasilitasi bidang koperasi dan UMKM
BBWS	Memfasilitasi area yang menjadi wilayah kerjanya
Satpol PP	Penegkan peraturan dan penertiban wilayah sekitar objek wisata
BP2KS	Memberikan ide dan gagasan pengembangan wisata khususnya pada bidang Promosi wisata Kota Semarang
Pokdarwis	ujung tombak pengembangan wisata di level terbawah
DKS	memberikan ide gagasan dan masukan kepada <i>leading sector</i> , sekaligus koordinator kesenian diluar Pemerintah
tematik	memberikan ide gagasan dan masukan kepada <i>leading secto</i> terutama pembinaan kampung tematik

DPRD	Formulasi. budgeting, evaluasi
Satpam Obvit	pengamanan dan kenyamanan pada objek dan wisatawan

Sumber : data diolah 2018

b. Peran swasta

Peran swasta dalam hal pengembangan pariwisata kota Semarang dilakukan oleh beberapa komponen yang ada di masyarakat. Komponen tersebut adalah PHRI, ASITA, PUTRI, APPS dan KADIN . Temuan lapangan dari penelitian ini adalah Pihak swasta dalam hal ini merasa kurang bisa bekerjasama dengan Pemerintah mengingat Pemerintah cenderung menumpang dibalik semua kegiatan swasta dan hanya sekedar memfasilitasi. Sedangkan harapan swasta pemerintah bisa menjadi mitra yang nyata disemua aspek kegiatan pengembangan pariwisata.

Tabel 2

Peran Swasta dalam pengembangan pariwisata kota Semarang

Swasta	Peran
PHRI	memberikan ide gagasan dan masukan kepada <i>aktor utama</i> , serta Pengelola hotel dan restoran
ASITA	memberikan ide gagasan dan masukan kepada <i>aktor utama</i> , serta Koordinator biro perjalanan dan travel
PUTRI	memberikan ide gagasan dan masukan kepada <i>aktor utama</i> serta Koordinator taman dan tempat rekreasi
APPS	memberikan ide gagasan dan masukan kepada <i>aktor utama</i> , serta Koordinator pelaku usaha pandanaran
KADIN	memberikan ide gagasan dan masukan kepada <i>aktor utama</i> , serta Koordinator bidang perdagangan dan UMKM

Sumber : data diolah 2018

c. Pola kemitraan Pemerintah dan Swasta

Wilks dan Wright mendukung 'tipologi' Rhodes yang dikutip Howlett

dan Ramesh (1995: 123) dengan alasan bahwa jaringan bervariasi sepanjang lima dimensi utama: (1) kepentingan anggota jaringan, (2) keanggotaan, (3) tingkat ketergantungan antar anggota, (4) sejauh mana jaringan terisolasi dari jaringan lain, (5) variasi dalam distribusi sumber daya antar anggota. Howlett dan Ramesh (1995: 131) mengutip pendapat Van Waarden (1992) telah menyatakan, jaringan kebijakan ini akan bervariasi sesuai dengan jumlah dan jenis peserta dan hubungan mereka satu sama lain.

Tabel 3
A Taxonomy Of Policy Network

		Number/Type of Network Participations			
		State Agencies	One Major Societal Group	Two Major Societal	Three or More
State/Societal Relations With in	State Directed	Bureaucratic Network	Clientelistic Network	Triadic Network	Pluralistic
	Society Dominant	Participatory	Caputured Network	Corporatist Network	Issue Network

Sumber : modeled after Frans Van Waarden, 'Dimensions and Types of Policy Network'. *European Journal of Political Research* 21, 1/2 (1992): 29-52

Berdasarkan kriteria ganda dari jumlah dan lokasi kepentingan kebijakan yang relevan dan pengetahuan, dapat ditemukan delapan jenis dasar jaringan kebijakan. *Bureaucratic Network* merupakan hal yang utama dimana interaksi antara anggota subsistem berlangsung secara efektif dalam Negara. Pada ekstrem yang lain, jaringan

masalah adalah satu dimana interaksi utama terjadi diantara sejumlah besar aktor sosial. Antara dua ekstrem ada enam kemungkinan lain. *Participatory statis Network*, merupakan orang-orang dimana aktor Negara memainkan peran utama namun didominasi oleh anggota masyarakat yang tidak terorganisir. **Pluralist Network**, adalah mereka dimana sejumlah aktor besar terlibat dalam subsistem tetapi aktor Negara yang dominan. Ketika hanya ada satu aktor sosial utama yang dihadapi Negara, dua jenis namun jaringan yang ada. Dalam *Clientelistic Network*, Negara mendominasi aktor sosial, sedangkan dalam *Captured Network* sebaliknya adalah benar. Ketika dua aktor sosial menghadapi Negara, jika Negara mendominasi subsistem tersebut dapat disebut sebagai *Triadic Network* . ketika aktor sosial mendominasi Negara, subsistem tersebut lebih mirip dengan *traditional corporatist network*.

Berkaitan dengan pola kemitraan dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang , maka Pemerintah sejatinya membutuhkan swasta dalam hal penyediaan barang - barang dan pelayanan yang tidak mampu disediakan oleh pemerintah, sebagai timbal baliknya maka, pemerintah akan memberikan stabilitas *financial* untuk proyek - proyek yang dijalankan oleh swasta. Dan apabila dikategorikan maka termasuk dalam kategori *Pluralist Network*. Adapun kelebihan dari pola ini adalah:

1. Memungkinkan entitas - entitas Pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk proyek dan kemitraan, karena tanpa pola kemitraan ini, swasta akan mengalami kesulitan dalam menyatukan paket pembiayaan yang besar ditambah jumlah otoritas pajak yang sangat besar.
2. Proyek untuk barang publik yang dikerjakan swasta terdandai, karena tanpa keterlibatan pemerintah dalam bentuk pembiayaan proyek secara langsung atau jaminan pinjaman atau bantuan lainnya, proyek tersebut bisa saja terhenti atau berjalan lamban.

3. Bagi swasta yang mampu berpartisipasi dalam proyek besar pemerintah maka secara tidak langsung ia akan mendapat nama yang patut diperhitungkan dan visibilitas dimana hal ini akan memudahkannya dalam mendapatkan klien dari sektor swasta.
4. Resiko keuangan rendah, karena ketika swasta bermitra dengan pemerintah maka kekhawatiran terkait kekurangan dana akan berkurang karena pemerintah memiliki pendapatan berkelanjutan dan kapasitas pinjaman untuk memenuhi kewajiban.

Selain segi kelebihan, kemitraan ini juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya:

- 1) Kecepatan lambat birokrasi, pemerintah memiliki proses penawaran formal yang begitu panjang dan rumit, sehingga bagi pihak swasta yang biasa bekerja cepat, hal ini akan menghambat pekerjaan mereka.
- 2) Pemerintah cenderung memilih siapa yang menang, dalam hal ini pemerintah memiliki kuasa lebih untuk memilih perusahaan secara bebas, melalui proses persaingan ini maka perusahaan mana yang menang maka perusahaan itulah yang akan dipilih.
- 3) Pergeseran politik dapat meniadakan kemitraan, hal ini karena pihak pemerintah terpilih hanya memiliki waktu yang terbatas selama masa kepemimpinannya, kecenderungan untuk tidak meneruskan proyek kepemimpinan pemerintah sebelumnya menimbulkan kekhawatiran dalam keberlangsungan anggaran proyek.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bertipe deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penulisan yang berisi uraian tentang suatu

objek sebagaimana adanya waktu tertentu, untuk memaparkan secara rinci serangkaian data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan (Yudiono , dalam Riris Ning Pambudi 2014:41). Data primer diperoleh dari nara sumber yang ditentukan secara *snoball*, dengan key informan Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan, media elektronik, dan Internet, serta jurnal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, verifikasi data, dan konklusi. Untuk validasi data dengan menggunakan *triangulasi* sumber. Fenomena yang diamati adalah Peran Pemerintah dan peran bisnis dalam pengembangan pariwisata kota Semarang serta pola kemitraan yang terjalin dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang.

D.KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan pariwisata di kota Semarang masih belum optimal, mengingat masing -masing masih berjalan sendiri-sendiri, peran pemerintah masih sangat dominan dan rasa enggan /kurang nyaman swasta menjalin kemitraan dengan pemerintah, sehingga rekomendasi yang disampaikan adalah meningkatkan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dengan merangkul semua elemen atau aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata berdasarkan asas sama- sama menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E, 2006, *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Muffin Company.
- Albert N. Kimbu Michael Z, Ngoasong, 2013, Centralized Decentralization of Tourism Development : A Network Perspective, *Annals of Tourism Research*, vol. 10, 235 – 259.
- Chui, Hua Lie et al., 2012, Improving Tourism Policy Implementation : The use of Hybrid MCDM Model, *Tourism Management*, (33), 413-426.

Dang Wang, John Ap, 2013, *Faktor Affecting Tourism Policy Implementation : Conceptual Framework and Case Study in China*. Journal of Tourism Management, (36), 221-233.

Howlett, Michel, dan Ramesh. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford: University Press.

Meitisa Vansa Simanjuntak, 2015, *Analisis Jaringan Aktor dalam Perlindungan Anak di Kota Semarang*, Tesis, MIA FISIP-UNDIP, Semarang

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyani, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media : Yogyakarta.

Suwitri, Sri, 2011, *Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik: Suatu Kajian Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Tri Yuniningsih, 2018, *Analisis Jaringan Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pariwisata Kota Semarang*, Desertasi, PRODAP FISIP –UNDIP, Semarang

Victoria M. Waligo, Jackie Clarke, Rebecca Hawkin, 2012, *Implementing Sustainable Tourism: Multi Stakeholder Involvement Framework*, Tourism Management, 30 1-12.

Sumber Lain

Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
Perda Kota Semarang No.9 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan

